

**PENGAWASAN PENEMPATAN PAPAN REKLAME
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 – 2014**

MAULIA PUTRI

Email : mauliaputri13@gmail.com

Pembimbing : Dr. Muchid, S.sos., M.Phil

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -
Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

Regional autonomy as a form of decentralization of government, essentially intended to meet the interests of the nation as a whole. In order to facilitate the growth and development or construction in urban areas it is necessary to use some funds from the State penerimaan that of local tax collection. One source of state revenue is derived from local tax levies. Local tax is a local government assets used to fund the organization of local government and regional development. Advertisement tax is one potential source of revenue, so that local governments need to do optimization. Placement of billboards outdoors have a considerable influence on life in urban areas due to media advertisements are often oriented location on the main streets of urban has the advantage, among others, a strategic location, easily accessible, agglomeration activities, completeness of facilities / social facilities and economic, as well as the readiness of the infrastructure, as a result of the desire to stand out so that the information conveyed more effectively. Billboard with all the visual characteristics have a major contribution to the impression of an environment. Billboards often placed or used in urban areas. So that the local government is more concerned with taxes rather than the beauty of the city, security and environmental safety. This is contrary to the vision mission pekanbaru one of which is the beauty. The method will be applied in this research is the application of the concept of control theory. Based on the results of research and discussion that has done research on the Implementation Monitoring Placement of Billboards in Pekanbaru then there are some things that can researcher make conclusions in this paper are: 1. Supervision placement of billboards in pekanbaru seen from all indicators ranging from setting tool gauges, conducting assessments and also held a corrective action can be said is still not performing well. 2. Factors affecting Implementation Monitoring Billboard placement in Pekanbaru as seen from all indicators from the Human Resources, forms of supervision and Infrastructures has not done well this is due to inadequate resources, such as personnel monitoring and enforcement are lacking and not comparable with the number of billboards in the community pekanbaru and less cooperation with the Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru in conducting surveillance.

Keywords: Control Theory, Billboard, Pekanbaru.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang baik pusat maupun di daerah. Pembangunan pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Maksud dan tujuan otonomi daerah secara tegas digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah berorientasi pada pembangunan. Dimana merupakan kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Guna memperlancar pertumbuhan dan perkembangan ataupun pembangunan di daerah perkotaan maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari pungutan pajak daerah .

Salah satu sumber penerimaan Negara adalah berasal dari pungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan aset pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah, yaitu :
 1. Pendapatan pajak daerah
 2. Hasil restribusi daerah
 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pajak reklame adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Penempatan papan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan di perkotaan karena media reklame tersebut sering kali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi yang strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif. Reklame dengan segala karakteristiknya secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan.

Papan reklame sering ditempatkan atau digunakan di perkotaan. Sehingga pemerintah daerah lebih mementingkan pajak daripada keindahan kota, keamanan dan keselamatan lingkungan. Ini bertolak belakang sesuai dengan visi misi kota pekanbaru salah satunya yaitu keindahan. Bagi pengusaha, papan reklame merupakan media promosi dari produknya, sehingga dari pemasangan papan reklame

berharap produknya dikenal konsumen atau masyarakat luas. Untuk itu papan reklame dibuat sebesar mungkin (agar terlihat dan mudah terbaca), setinggi mungkin (agar dari jarak jauh sudah terlihat), dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (misalnya dipinggir jalan atau di atas jalan). Begitu juga dengan warna-warna dan penerangan yang dipakai agar reklame mencolok sehingga mendominasi pandangan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, penulis menemui penyimpangan atau kenyataan yang belum sesuai dengan peraturan dalam pemasangan reklame berupa, penyimpangan tata letak yang penulis temui berdiri di simpang empat dari jalan tuanku tambusai mengarah ke jalan arengka. Dalam regulasi Perwako No 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame seharusnya reklame berdiri pada sebrang jalan pintu masuk Mall SKA. (www.seriau.com). Selanjutnya adalah izin penyelenggaraan reklame. Dalam kasus perizinan reklame penulis juga menemukan reklame yang tidak berizin berdiri diujung Jalan Jendral Sudirman (didepan pintu masuk bandara SSQ II). (www.seriau.com). Reklame yang berdiri tidak sesuai izin tersebut juga sangat mengganggu kepentingan umum pejalan kaki, karena letaknya yang kurang di atur dan tidak melihat segi keindahan.

2. KONSEP TEORI

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka sebelum membahas masalah-masalah tentang pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru maka penulis akan mengungkapkan konsep teori yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

A. Manajemen

Menurut **Siswanto (2005:7)** mengatakan manajemen adalah ilmu dan

seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi

Selanjutnya **Yahya(2006:2)** sebagai seni, manajemen adalah manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat.

Menurut **Malayu S.P Hasibuan (2005:23)** mengatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengendalian
- d. Penempatan
- e. Pengarahan
- f. Pemasalahan
- g. Komunikasi
- h. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara efisien.

Menurut **George R.Terry dalam Manullang (2008:3)** fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)
4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Menurut **Iskandar Kasim (2005:5)** pemanfaatan utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses-proses :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan perencanaan
- c. Pengawasan

Dimana proses yang ada dalam manajemen ini saling bekerja sama antara

satu dan lainnya sehingga terwujudlah tujuan dari organisasi tersebut.

Menurut **Hani Handoko (2001:8)**, mendefinisikan manajemen adalah proses:

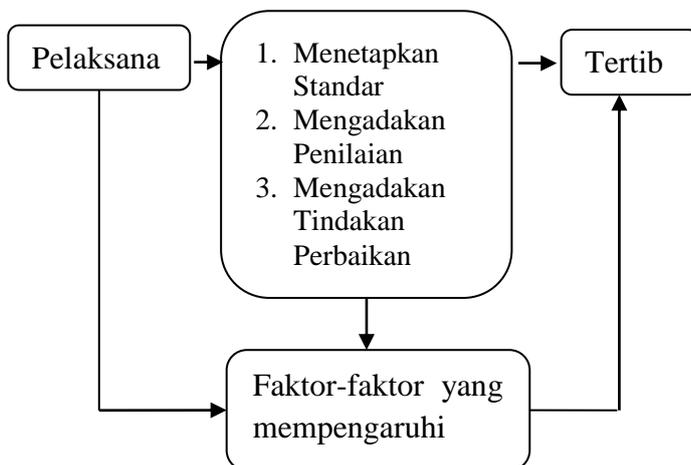
- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. Pengawasan

B. Pengawasan

Menurut **Manullang (2008 :185)** Pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Dalam membahas permasalahan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan Reklame di Kota Pekanbaru maka penulis merumuskan kerangka berfikir sesuai dengan fenomena dan konsep teori sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Berfikir
Perwako 24 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan reklame



3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan papan reklame di Kota

Pekanbaru, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standart)
2. Melakukan Tindakan Penilaian
3. Mengadakan tindakan perbaikan

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator menurut jawaban yang telah dilakukan dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator di atas:

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang dalam memberikan izin mendirikan papan reklame di Kota Pekanbaru memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola, dimana syarat tersebut terdapat dalam standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

“Ada rekomendasi yang harus didapatkan setiap pemilik reklame dari instansi terkait untuk mendapatkan izin mendirikan papan reklame, misalnya reklame itu berdiri di jalur hijau harus mendapatkan rekomendasi dari dinas kebersihan dan pertamanan. Kebanyakan reklame yang berdiri tidak ada izin rekomendasinya dan menyalahi aturan yang ada. (Wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 25 Maret 2015)

2. Melakukan Tindakan Penilaian

Penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Walikota no 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame. **Pengawasan preventif**

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengamati secara langsung dengan cara turun langsung ke lapangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame agar tidak terjadi pelanggaran dalam membuat atau menempatkan papan reklame sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami, selaku pelaksana pengawasan penempatan papan reklame dari dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru melakukan pengawasan ke lapangan jika ada orang yang ingin menyelenggarakan reklame dengan mengecek ke lapangan apakah reklame tersebut dipasang di tempat yang benar atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan berdasarkan izin yang diberikan”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Operasional Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 25 Maret 2015)

Sebagai pelaksana pengawasan dari Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan untuk memantau proses penempatan papan reklame namun waktu pengawasan ke lapangan tidak dilakukan setiap hari dan jumlah petugas yang melakukan pengawasan hanya berjumlah 15 orang. Hal ini dirasa sangat belum maksimal dikarenakan permasalahan yang terjadi dilapangan akan lambat dicarikan solusinya.

“jumlah tim pengawas disini sangat sedikit berjumlah 15 orang, itupun dibagi 5 orang untuk 4 kecamatan. Hal ini sangat kurang karna bukan hanya reklame saja yang harus

diawasi.”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Operasional Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 25 Maret 2015)

Pengawasan Represif

Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif ini biasanya dilakukan dalam bentuk:

1. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawab disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

“Papan reklame yang telah dipasang akan diperiksa bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya, salah satu bentuknya adalah laporan hasil pemasangan papan reklame adalah berupa foto papan reklame yang telah di pasang, kemudia di periksa apakah sesuai dengan izin yang diberikan atau tidak”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 25 Maret 2015)

2. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi

“setelah papan reklame itu dipasang kami melakukan pengawasan kembali ke lapangan. Kami juga mengikut sertakan dinas terkait untuk melihat kembali apakah reklame yang dipasang itu

menyalahi izin atau aturan yang berlaku.”(Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Operasional Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 25 Maret 2015).

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi .hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang sama. Perbaikan terhadap penyimpangan ini berupa:

Kordinasi

Salah satu bentuk perbaikan terhadap pengawasan penempatan papan reklame adalah dengan melakukan kordinasi antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Satpol PP kota Pekanbaru dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kerjasama yang baik antar dinas terkait yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan penertiban papan reklame di Kota Pekanbaru

“sebagai eksekutor di lapangan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam memperoleh data reklame yang sudah habis masa dan kadaluarsanya, sehingga nanti eksekusi di lapangan dapat berjalan dengan lancar. Dan seharusnya juga tata kota melakukan kordinasi dulu dengan Satpol PP dan Dispenda dalam pemasangan atau pemberian izin papan reklame. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Kebanyakan papan reklame yang ada sekarang dipasang di jalur hijau, tentu saja tidak bisa kita bongkar karena sudah memiliki izin dari Dispenda kota

pekanbaru” (wawancara dengan Seksi Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru, 26 Maret 2015)

Pemberian Sanksi

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan papan reklame. Sanksi ini diberikan langsung oleh Satpol PP Kota Pekanbaru terhadap papan reklame yang menyalahi aturan dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan. Dimana sanksi yang diberikan apabila pihak penyelenggara papan reklame melakukan kesalahan akan dikenakan berupa teguran atau pembongkaran papan reklame.

“Sebelum melakukan tindakan pembongkaran , terlebih dahulu diadakan komunikasi dengan pemilik reklame karena kami sebagai eksekutor lapangan juga harus melakukan tugas seperti yang telah di tetapkan , tidak benar selama ini kami diam saja melihat papan reklame yang menyalahi aturan namun proses nya tentu tidak secepat aturan yang di perkirakan masyarakat, ada pemberitahuan tertulis terlebih dahulu jika pemberitahuan secara resmi ini tidak di tanggap maka pembongkaran paksa akan kami lakukan terhadap papan reklame yang melanggar aturan.(Wawancara dengan PPNS Satpol PP Kota Pekanbaru, 26 Maret 2015)

“ Kalau sanksi yang telah di berlakukan dan di berikan saat ini ada bermacam-macam sanksi yang diterapkan, ada berupa sanksi tertulis dan juga secara tidak tertulis, yang secara tertulis diberikan peringatan pertama, kedua, ketiga, jika tidak ada tanggapan dari peringatan tertulis

yang telah di berikan kepada pemilik reklame maka kami akan melakukan pembongkaran terhadap papan reklame yang melanggar peraturan tersebut”(wawancara dengan staff PPNS Satpol PP Kota Pekanbaru, 26 Maret 2015)

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pengawasan dan penertiban papan reklame di kota pekanbaru, ditemukan beberapa factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota pekanbaru. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan. sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru. sumber daya manusia dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru dan juga akan dapat dipengaruhi pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru apabila terjadi kecukupan dan kelebihan sumber daya manusianya atau jumlah pegawainya.

a. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam mengawasi papan reklame yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 15 Orang.

“Ada 15 orang yang bertugas mengawasi atau memeriksa papan reklame yang ada di Kota

Pekanbaru ini, dimana 1-4 pegawai megawasi atau memeriksa 1 kecamatan, ini di akui sangat jauh dari jumlah pegawai yang di harapkan dimana papan reklame yang begitu banyak di awasi pegawai yang sedikit sehingga pengawsan menjadi kurang optimal”.(Wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 25 Maret 2015)

b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Jumlah anggota atau personil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Fakta yang terjadi di lapangan ialah kurangnya jumlah petugas atau personil dalam kegiatan pengawasan penempatan papan reklame di kota Pekanbaru. ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara penelitian :

“ jumlah prsonil yang kami miliki tidak sebanding dengan pekerjaan yang sangat banyak hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas yang memakan waktu lebih lama, untuk itu kami berusaha mengajukan penambahan kepada walikota untuk sehingga nantinya tugas fungsi dan tanggungjawab dapat lebih terlaksana dengan baik dengan seefektif dan seefisien mungkin. Jumlah personil yang dibutuhkan Satpol PP samapi dengan 2017 sebanyak 1000 personil, Karena banyaknya

pertimbangan dan beban tugas yang kami jalani.” (Wawancara dengan kepala Sub Bagian Tata Usaha Satpol PP Kota Pekanbaru, 26 Maret 2015)

“Jumlah personil yang di turunkan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan sangat berpengaruh terhadap kinerja yang di hasilkan karena tugas yang di berikan tidak sebanding denganmak jumlah personil , oleh karena itu pelaksanaan tugas di lapangan cukup memakan waktu”(Wawancara dengan Seksi Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru, 26 Maret 2015)

Bentuk Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru yang di lakukan secara langsung dan memiliki jadwal rutin dan teratur namun pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame masih belum maksimal sehingga masih banyak papan reklame yang belum memenuhi standart yang berlaku sesuai dengan peraturan walikota no 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru.

Sarana dan Prasarana

Sarana atau prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan dalam melakukan penertiban atau pembongkaran papan reklame dibutuhkan alat atau sarana dan prasarana yang memadai

“Alat atau sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam hal ini pembongkar papan reklame masih sangat kurang, apalagi jika kami membongkar billboard yang besar

kami membutuhkan waktu yang lama untuk memotong tiang atau membongkar billboard”.(Wawancara dengan Seksi Operasional Satpol PP kota Pekanbaru, 26 Maret 2015).

Dari hasil kutipan wawancara diatas jelas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penempatan papan reklame kota pekanbaru adalah sarana dan prasarana yang merupakan faktor penting untuk kelancaran pelaksanaan proses pengawasan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan reklame Di Kota Pekanbaru maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan kesimpulan dalam penulisan ini yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan penempatan papan reklame di kota pekanbaru dilihat dari semua indikator mulai dari menetapkan alat pengukur, mengadakan penilaian dan juga mengadakan tindakan perbaikan dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya papan reklame yang belum sesuai dengan standar yang telah di tetapkan dalam peraturan yang berlaku tentang penempatan papan reklame di Kota Pekanbaru.
2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan penempatan Papan Reklame Di Kota Pekanbaru yang dilihat dari semua indikator mulai dari Sumber Daya Manusia, bentuk pengawasan dan Sarana dan Prasarana belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan sumber daya yang

kurang memadai, seperti personil pengawasan dan penertiban yang kurang dan tidak sebanding dengan banyaknya papan reklame yang ada di pekanbaru dan masyarakat yang kurang bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan. Yang menjadi faktor sangat penting dalam melakukan pengawasan dan penertiban ini adalah faktor sumber daya manusia, karena apabila biaya sudah ada dan masyarakat yang mendukung tetapi personil Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak memiliki kecakapan dan tanggung jawab dalam bertugas maka tidak akan berjalan sesuai yang kita inginkan.

Dari penelitian yang telah peneliti yang dilakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh pemerintah atau dinas terkait dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan penertiban papan reklame di kota pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Agar Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru

melakukan pengawasan lebih intensif terhadap papan reklame di kota pekanbaru dan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang masih dirasa kurang dalam melakukan pengawasan.

2. Sebaiknya Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan lagi kordinasi dengan dinas yang terkait dalam mengatasi tata letak dan penempatan perizinan papan reklame di kota Pekanbaru.
3. Agar Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru lebih selektif dalam pemberian izin papan reklame dan melihat kembali ke lapangan syarat dan tata letak papan reklame yang seharusnya.
4. Koordinasi antara pihak terkait mengenai pelaksanaan papan reklame di Kota Pekanbaru antara pihak Dinas Pendapatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat lebih ditingkatkan kerjasamanya sehingga papan reklame di Kota Pekanbaru sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Alfabeta. Bandung
- H.B, Siswanto.2005, Pengantar Manajemen, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta
- Hadari, Nawawi, 2002.Pengawasan atasan langsung di lingkungan aparatur pemerintahan. Jakarta
- Harahap, Syafri, Sofyan.2004. Sistem pengawasan Manajemen. Penerbit Quantum. Jakarta
- Handoko T. Hani 2003. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. Manajemen. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Kasim, Iskandar, 2005. Manajemen Perubahan CV. Alfabeta. Bandung
- Kencana, Inu. 2006. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta
- Manullang M. 2008. Dasar-dasar Manajemen Yogyakarta: UGM Press
- Marnis. 2006. Pengantar Manajemen. Pekanbaru :Unri Press.
- Moleong, J, Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya , Bandung
- Rachmawati. 2009. Dasar-dasar manajemen. Jakarta. Erlangga
- Sarundajang, H. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Katahasta Pustaka, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT.Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian, Sondang.P.2005. Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta
- Soejito Irawan, 2000, Pengawasan PERDA dan Kepala Daerah, Bina Aksara, Jakarta
- Sujamto. M. Arifin 2003. Sistem pengawasan Manajemen, PT.Pustaka Quantum. Jakarta
- Sukanto.2002. Sistem Pengawasan Manajemen, PT Pustaka Quantum. Jakarta
- Sukarna , Drs. 2011. Dasar-dasar Manajemen. PT. Pustaka Quantum, Jakarta
- Winardi. 2001. Kepemimpinan Dalam Manajemen. PT. Reneka Cipta, Jakarta
- Yahya, Yohannes. 2006. Pengantar Manajemen. Penerbit Graha Ilmu , Yogyakarta

Dokumen:

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru